

RENCANA KERJA TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja Tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Benteng, 11 Maret 2022

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MASSAILE
NIP. 19650806 199402 1 003

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 1 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 | |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 5 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... | 29 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 29 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 30 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .. | 32 |
| BAB V PENUTUP | 33 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Petrangkat Daerah s/d Tahun 2020 | 6 |
| Tabel 2.2 | Rumusan rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 | 34 |

SISTEMATIKA RANCANGAN RENJA DP3AP2KB

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu tim dan/atau seseorang mencapai tujuan tersebut. Melalui rencana kerja, kita dapat memecah proses jadi tugas-tugas kecil yang ringan sekaligus mengetahui apa saja yang ingin dicapai.

Rencana kerja perangkat daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan yang memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Renstra DP3AP2KB memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) yang disusun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada DP3AP2KB, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP3AP2KB dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar dan berpedoman pada Renstra Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9271);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 25);
13. Instruksi Bupati Nomor 059/17.a/Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang Inklusif;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 109 Tanggal 30 Desember 2021);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 144 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 695 Tanggal 31 Desember 2021).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja DP3AP2KB dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar dan berpedoman pada Renstra Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja DP3AP2KB adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Menetapkan program dan kegiatan DP3AP2KB Tahun 2023;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DP3AP2KB;
4. Memberikan acuan dalam penngendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan DP3AP2KB.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah DP3AP2KB Tahun 2023 disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

Bab II. HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Renja DP3AP2KB merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra DP3AP2KB. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja DP3AP2KB Tahun 2021 telah terlewat. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja DP3AP2KB dan pencapaian Renstra s/d Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja DP3AP2KB dan Hasil Pencapaian renstra s/d 2021

| NO | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 | | Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 | |
|----|---|---|--|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|------------------|--|---------------|--|---------------|--|------|--|------|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | I | | II | | III | | IV | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 11/6 *100% | | 14 = 12/5 *100% | |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Capaian Kinerja (%) | 72,31 | 600,689,366 | 100 | 6,005,688,366 | 9.46 | 567,940,805 | 34.85 | 2,093,178,729 | 50.34 | 3,023,441,408 | 802.27 | 4,556,401,989 | 94.65 | 5,684,560,942 | 94.65 | 5,684,560,942 | 0.95 | 0.95 | 1.31 | 9.46 |
| | Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah | | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan | | Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%) | 95,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 | 130,000,000 | 100 | 130,000,000 | 0 | 0 | 2.16 | 2,812,800 | 3.46 | 4,492,800 | 65.31 | 12,581,000.00 | 65.31 | 12,581,000 | 65.31 | 12,581,000 | 0.65 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun | 6 Dok | 4,049,437,081 | 7 Dokumen | 15,000,000 | 0 | 0 | 4 dok | 2,812,800 | 5 Dok | 4,492,800 | 5 Dok | 12,581,000.00 | 5 | 12,581,000 | 5 | 12,581,000 | 0.71 | 0.84 | 0.83 | 0.00 |
| | Meningkatnya ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah | 100 | 4,049,437,081 | 100 | 3,909,100,000 | 13.90 | 543,370,402 | 46.32 | 1,810,770,052 | 65.61 | 2,564,955,925 | 669.04 | 3,635,389,774 | 65.61 | 3,635,389,774 | 65.61 | 3,635,389,774 | 0.66 | 0.93 | 0.66 | 0.90 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan | 41 org | 3,919,437,081 | 100 | 3,893,100,000 | 5.54 | 543,370,402 | 18.26 | 1,807,673,252 | 25.86 | 2,559,129,925 | 37.83 | 3,619,347,774.00 | 37.83 | 3,619,347,774 | 37.83 | 3,619,347,774 | c | 0.93 | 0.63 | 0.92 |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Penyuluh KB yang dinilai angka kreditnya | 19 org | 25,000,000 | 20 Orang | 11,000,000 | 0 | 0 | 19 org | 1,616,800 | 19 org | 4,346,000 | 19 org | 8,692,000.00 | 19 org | 8,692,000 | 19 org | 8,692,000 | 0.95 | 0.79 | 1.00 | 0.35 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------|------|-------|------|
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase Dokumen Laporan Keuangan Yang disusun Secara Tepat, Akurat Dan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah | 1 laporan | 25,000,000 | 1 laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | 1 laporan | 1,480,000 | 1 laporan | 1,480,000 | 1 laporan | 7,350,000.00 | 1 laporan | 7,350,000 | 1 laporan | 7,350,000 | 1.00 | 1.47 | 1.00 | 0.29 |
| Meningkatnya ketersediaan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan administrasi umum | 100 | 368,500,000 | 12 Bulan | 220,440,100 | 0 | 400,000 | | 55,749,999 | | 96,943,079 | - | 283,775,879 | 0 | 283,775,879 | 0 | 283,775,879 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.77 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5 jenis | 30,000,000 | 12 Bulan | 1,998,000 | 0 | 0 | 6 bln | 971,500 | 9 bln | 1,998,000 | 12 bln | 1,998,000 | 12 bln | 1,998,000 | 12 bln | 1,998,000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.07 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan Gedung kantor Yang Tersedia | 10 jenis | 70,000,000 | 6 Unit | 24,980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 Unit | 60,940,000 | 6 Unit | 60,940,000.00 | 6 Unit | 60,940,000.00 | 1.00 | 2.44 | 0.87 | 0.87 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 3 jenis | 40,000,000 | 12 Bulan | 14,005,100 | 3 bln | 400,000 | 6 bln | 4,804,800 | 9 bln | 8,101,600 | 12 Bln | 21,815,700.00 | 12 Bln | 21,815,700 | 12 Bln | 21,815,700 | 1.00 | 1.56 | 1.20 | 0.55 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | 2 jenis | 3,500,000 | 12 Bulan | 1,800,000 | 0 | 0 | 6 bln | 600,000 | 9 bln | 600,000 | 12 Bln | 2,400,000 | 12 Bln | 2,400,000 | 12 Bln | 2,400,000 | 1.00 | 1.33 | 6.00 | 0.69 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah | 355 SPD | 165,000,000 | 1 Tahun | 177,657,000 | 0 | 0 | 6 bln | 49,373,699 | 9 bln | 86,243,479 | 12 Bln | 196,622,179.00 | 12 Bln | 196,622,179 | 12 Bln | 196,622,179 | 1.00 | 1.11 | 1.00 | 1.19 | |
| | Tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran | 100% | 1,062,092,959 | 100 | 467,257,900 | 100 | 15,245,563 | 50 | 190,729,059 | 75 | 286,814,356 | 95 | 498,272,662 | 95 | 400,032,662 | 95 | 400,032,662 | 0.95 | 0.86 | 95.00 | 0.38 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah jasa surat menyurat | 3 jenis | 94,461,285 | 12 Bulan | 69,764,100 | 0 | 0 | 6 bln | 24,999,000 | 9 bln | 43,957,500 | 12 bln | 98,240,000 | 12 bln | 98,240,000 | 12 bln | 98,240,000 | 1.00 | 1.41 | 4.00 | 1.04 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah layanan telepon, listrik dan air yang tersedia | 3 layanan | 35,000,000 | 3 Jasa | 70,277,800 | 3 Jasa | 14,613,223 | 3 jasa | 27,914,319 | 3 Jasa | 40,252,816 | 3 Jasa | 54,524,322.00 | 3 Jasa | 54,524,322 | 3 Jasa | 54,524,322 | 1.00 | 0.78 | 1.00 | 1.56 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | - | 1 Tahun | 327,216,000 | 3 bln | 632,340 | 6 bln | 162,814,740 | 9 bln | 246,561,540 | 12 bln | 345,508,340.00 | 12 bln | 345,508,340.00 | 12 bln | 345,508,340.00 | 1.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | |
| Tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 348,750,000 | | 145,102,000 | | 8,924,840 | | 33,116,819 | | 70,235,248 | - | 126,382,674 | | 126,382,674 | | 126,382,674 | | 0.87 | | 0.36 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------|-------------|-----------|-------------|--------|-----------|---------|------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|--------|------|-------|-------|
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan | 5 mobil+57 motor | 113,750,000 | 93 Unit | 114,960,000 | 57 | 8,424,840 | 57 | 29,516,819 | 57 | 56,479,848 | 114 | 100,978,674 | 171 | 100,978,674.00 | 171 | 100,978,674.00 | 0.61 | 0.88 | 0.92 | 0.89 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang di pelihara | 3 Jenis | 40,000,000 | 20 Unit | 10,150,000 | 6 unit | 500,000 | 10 unit | 3,600,000 | 10 unit | 3,600,000 | 10 unit | 7,384,000.00 | 10 unit | 7,384,000.00 | 10 unit | 7,384,000.00 | 0.50 | 0.73 | 3.33 | 0.18 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Gedung Kantor | 1 ktr | 70,000,000 | 1 Gedung | 19,992,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Gedung | 10,155,400 | 1 Gedung | 18,020,000.00 | 1 Gedung | 18,020,000.00 | 1 Gedung | 18,020,000.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.26 |
| | Meningkatnya Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%) | 0.28 | 147,065,837 | | 232,000,000 | | 0 | | 9,860,000 | | 162,860,000 | - | 220,248,200 | | 220,248,200 | | 220,248,200 | | 0.95 | | 1.50 |
| | Meningkatnya Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kewenangan kabupaten | 14,05 | 77,065,837 | 50 Orang | 31,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,860,000 | 0 | 8,360,000 | 50 Orang | 24,500,000 | 0 | 24,500,000 | 0 | 24,500,000 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.32 |
| | | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah sosialisasi pelaksanaan PUG termasuk PPRG | 2 | 21,000,000 | 50 Orang | 31,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,860,000 | 0 | 8,360,000 | 50 Orang | 24,500,000 | 50 Orang | 24,500,000.00 | 50 Orang | 24,500,000.00 | 1.00 | 0.79 | 25.00 | 1.17 |
| | Meningkatnya Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif daerah | 28% | 55,000,000 | 24% | 26,000,000 | 24% | 0 | 24% | 3,000,000 | 24% | 4,500,000 | 24 | 25,050,000 | 24 | 25,050,000 | 24 | 25,050,000 | 100.00 | 0.96 | 85.71 | 0.46 |
| | | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan yang di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 2 | 30,000,000 | 40 persen | 26,000,000 | 0 | 0 | 1 | 3,000,000 | 1 | 4,500,000 | 1 | 25,050,000 | 1 | 25,050,000 | 1 | 25,050,000 | 1.00 | 0.96 | 0.50 | 0.84 |
| | Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kewenangan Kabupaten | 87,00 | 15,000,000 | | 175,000,000 | | 0 | 0 | 0 | | 150,000,000 | - | 170,698,200 | | 170,698,200 | | 170,698,200 | | 0.98 | | 11.38 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------|------------|--------------|-------------|---|----|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------|------|-------|-------|
| | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dharma wanita) | 100% | 15,000,000 | 100% | 175,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 150,000,000 | 95 | 170,698,200.00 | 95 | 170,698,200.00 | 95 | 170,698,200.00 | 0.95 | 0.98 | 95.00 | 11.38 |
| 2 | Menurunnya Rasio Kekerasan terhadap Perempuan | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | 0.001 | 30,128,180 | 0.001 | 31,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 4,500,000 | - | - | 29,347,000 | 29,347,000 | 29,347,000 | 29,347,000 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | | |
| | Meningkatkan Layanan Pendampingan Perlindungan Perempuan | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Pendampingan Perlindungan Perempuan | 100 | 20,000,000 | 100 | 31,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 4,500,000 | - | 29,347,000 | 29,347,000 | 29,347,000 | 29,347,000 | 29,347,000 | 0.95 | 0.95 | 1.47 | 1.47 | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga kerjasama dalam penyediaan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten | 8 | 20,000,000 | 10 | 31,000,000 | 0 | 0 | 8 | 3,000,000 | 8 | 4,500,000 | 8 | 29,347,000 | 8 | 29,347,000 | 8 | 29,347,000 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 1.47 |
| | Meningkatnya kualitas keluarga, kebudayaan dan peran perempuan dalam | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi (%) | 10% | 22,100,000 | | 46,000,000 | 0 | 0 | 5,543,000 | 7,043,000 | - | 44,580,000 | 0 | 7,043,000 | 0 | 7,043,000 | 0 | 7,043,000 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.32 |
| | Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Hak Anak | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga | 100 | 22,100,000 | 100 | 46,000,000 | 0 | 50 | 5,543,000 | 65 | 7,043,000 | 75 | 44,580,000 | 75 | 7,043,000 | 75 | 7,043,000 | 0.07 | 0.15 | 0.75 | 0.32 | |
| | | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan | 4 | 22,100,000 | 11 Kecamatan | 46,000,000 | 0 | 0 | 11 Kecamatan | 5,543,000 | 11 Kecamatan | 7,043,000 | 11 Kecamatan | 44,580,000.00 | 11 Kecamatan | 7,043,000 | 11 Kecamatan | 7,043,000 | 1.00 | 0.15 | 2.75 | 0.32 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------|-------------------|--------------|------------|---|----|------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3 | Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak | 0.88 | 21,787,531 | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19200000 | 0 | 19200000 | 0 | 19200000 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.88 | |
| | Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten | 0,88 | 21,787,531 | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9,600,000.00 | 0 | 9600000 | 0 | 9600000 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.44 | |
| | | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah data gender dan anak yang tersedia | 80% | 11,287,531 | 11 Kecamatan | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 Kec. | 9,600,000.00 | 11 Kec. | 9,600,000.00 | 11 Kec. | 9,600,000.00 | 1.00 | 0.96 | 138.75 | 0.85 | |
| 4 | Terjalannya kerjasama antara lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (%) (skor indikator KLA) | 60,00 | 35,687,976 | | 66,000,000 | 0 | | 12,215,000 | | 14,385,000 | - | 49,071,000 | 0 | 49,071,000 | 0 | 49,071,000 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 1.38 | |
| | Meningkatnya PHA yang Terakomodir pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase PHA yang Terakomodir pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten | 100% | 35,687,976 | 100% | 26,000,000 | 0 | 45 | 5,725,000 | 50 | 6,125,000 | 50 | 21,625,000 | 50 | 21,625,000 | 50 | 21,625,000 | 0.50 | 0.83 | 50.00 | 0.61 | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten | 6 kali | 0 | 4 kali | 26,000,000 | 0 | 0 | 1 | 5,725,000 | 2 | 6,125,000 | 2 | 21,625,000.00 | 2 | 21,625,000.00 | 2 | 21,625,000.00 | 0.50 | 0.83 | 0.33 | 0.00 |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | 100% | 10,000,000 | 1 Tahun | 40,000,000 | 0 | 0 | 16.23 | 6,490,000 | 20.65 | 8,260,000 | - | 27,446,000 | 20.65 | 27,446,000 | 20.65 | 27,446,000 | 20.65 | 0.69 | 20.65 | 2.74 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------|------------|--------------|-------------|---|---|-------------|-------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|------|------------|------|-------|------|------|
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten | 15 kali | 0 | 1 Tahun | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Media Massa (cetak dan elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan KIE Pemenuhan Hak | 2 | 10,000,000 | 11 Kecamatan | 20,000,000 | 0 | 0 | 6,490,000 | 8,260,000 | - | 17,446,000.00 | 0 | 17,446,000.00 | 0 | 17,446,000.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 1.74 | | |
| 5 | Terjalannya kerjasama antara lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dalam Perlindungan Khusus anak | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota | 100 | 66,362,594 | | 26,000,000 | 0 | 0 | 3,860,000 | 6,660,000 | - | - | 0 | 15,510,000 | 0 | 15,510,000 | 0.60 | 0.23 | | | | |
| | Meningkatnya Peran Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 100 | 30,000,000 | | 26,000,000 | 0 | 0 | 3,860,000 | 6,660,000 | - | 15,510,000 | 0 | 15,510,000 | 0 | 15,510,000 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.52 | | |
| | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 3 Kec | 15,000,000 | 100% | 26,000,000 | 0 | 0 | 3,860,000 | 6,660,000 | - | 15,510,000.00 | 0 | 15,510,000 | 0 | 15,510,000 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 1.03 | | |
| 6 | Menurunnya Angka Kelahiran | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | TFR (Angka Kelahiran Total) | 2.04 | 21,787,531 | | 122,000,000 | 0 | 0 | 162,037,000 | 628,096,500 | - | - | 0 | 1,707,317,800 | 0 | 1,707,317,800 | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 78.36 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------|---------------|-----------|---------------|---|----|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|------|------|------|------|
| | Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Persentase Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 0 | 0 | 100 | 31,000,000 | 0 | 50 | 3,000,000 | 65 | 4,500,000 | 75 | 24,560,000 | 75 | 24,560,000 | 75 | 24,560,000 | 0.75 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | |
| | | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Formal | - | 0 | 3 Sekolah | 31,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 4,500,000 | - | 24,560,000.00 | 0 | 24,560,000.00 | 0 | 24,560,000.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | |
| | Meningkatnya Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah yang Dipetakan | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah yang Dipetakan | 100 | 21,787,531 | | 91,000,000 | 0 | | 12,650,000 | | 16,885,000 | - | 31,985,000 | 0 | 31,985,000 | 0 | 31,985,000 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 1.47 | |
| | | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Data Keluarga yang Dicatat dan Dikumpulkan | 36514 KK | 5,000,000 | 40000 kk | 65,000,000 | 0 | 0 | 2,900,000 | | 2,900,000 | - | 7,730,000.00 | | 7,730,000 | | 7,730,000 | | 0.12 | | 1.55 | |
| | | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang Diolah dan Dilaporkan | 15 Faskes | 11,787,531 | 15 Faskes | 26,000,000 | 0 | 0 | 15 Faskes | 9,750,000 | 15 Faskes | 13,985,000 | 15 Faskes | 24,255,000.00 | 15 Faskes | 24,255,000 | 15 Faskes | 24,255,000 | 1.00 | 0.93 | 1.00 | 2.06 |
| 7 | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang program banggakenana | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%) | 80.50 | 3,269,089,451 | | 3,810,695,000 | 0 | | 198,205,253 | | 997,453,900 | - | 2,531,103,263 | | 2,531,103,263 | | 2,531,103,263 | | 0.66 | | 0.77 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------------|-------------------|---------------|---|---|----------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--------|------|--------|------|
| Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang program banggakenca na | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Peresentase Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB | 100 | 941,689,451 | 100 | 986,170,000 | 0 | 0 | 50 | 39,168,253 | 65 | 373,857,400 | 75 | 848,345,463 | 75 | 848,345,463 | 75 | 848,345,463 | 0.65 | 0.86 | 0.75 | 0.90 |
| | Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik yang Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk Promosi dan KIE Program KKBP | 2 | 61,689,451 | 11 Kecamatan | 168,562,000 | 0 | 0 | | 25,481,500 | | 69,272,000 | - | 141,001,800.00 | 0 | 141,001,800 | 0 | 141,001,800 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 2.29 |
| | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP | Jumlah Balai Penyuluhan KKBP yang tersedia Pengelolaam Operasionalnya | 11 | 250,000,000 | 11 Kecamatan | 817,608,000 | 0 | 0 | 11 balai | 13,686,753 | 11 balai | 304,585,400 | 11 balai | 707,343,663.00 | 11 balai | 707,343,663 | 11 balai | 707,343,663 | 100.00 | 0.87 | 100.00 | 2.83 |
| Meningkatnya Kapasitas PKB/PLKB | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 100 | 744,400,000 | 100 | 1,239,701,500 | 0 | 0 | | 148,200,000 | 75 | 429,523,000 | 100 | 952,465,000 | 100 | 952,465,000 | 100 | 952,465,000 | 100.00 | 0.77 | 1.00 | 1.28 |
| | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | 1 laptop + 1 printer | 20,000,000 | 11 Kecamatan | 450,307,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 balai | 136,123,000 | - | 173,065,000.00 | 11 balai | 173,065,000 | 11 balai | 173,065,000 | 1.00 | 0.38 | 1.00 | 8.65 |
| | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBP untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBP untuk Lapangan Petugas KB/ Penyuluh (PKB/PLKB) | 11 kali | 90,000,000 | 3 Paket | 204,994,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 Kec. | 195,000,000.00 | 11 Kec. | 195,000,000.00 | 11 Kec. | 195,000,000.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 2.17 |
| | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Digerakkan | 474 org | 584,400,000 | 88 Desa/Kelurahan | 584,400,000 | 0 | 0 | 474 org | 148,200,000 | 474 org | 293,400,000 | 474 org | 584,400,000.00 | 474 org | 584,400,000 | 474 org | 584,400,000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------|--------------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------|------|------|------|
| Meningkatnya Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten | 100 | 1,113,000,000 | 100 | 911,575,500 | 0 | 50% | 6,540,000 | 60% | 87,242,500 | 75% | 280,507,800 | 75% | 280,507,800 | 75% | 280,507,800 | 0.75 | 0.31 | 0.75 | 0.25 | |
| | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang Didistribusikan Ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) termasuk Jaringan dan | 15 Faskes | 90,000,000 | 15 Faskes | 27,405,000 | 0 | 0 | 15 Faskes | 3,540,000 | 15 Faskes | 17,546,000 | 15 Faskes | 21,476,000.00 | 15 Faskes | 21,476,000 | 15 Faskes | 21,476,000 | 1.00 | 0.78 | 1.00 | 0.24 |
| | Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang yang Ditingkatkan | 15 Orang | 70,000,000 | 15 Faskes | 8,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 750,000.00 | 0 | 750,000.00 | 0 | 750,000.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Peserta KB yang Menggunakan MKJP | 3690 PUS | 198,000,000 | 11 Kecamatan | 698,008,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 73,390,000.00 | 0 | 73,390,000.00 | 0 | 73,390,000.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.37 |
| | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB yang tersedia | 1 Gudang Alokon | 80,000,000 | 1 Unit | 121,912,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,940,000 | - | 140,790,300.00 | 0 | 140,790,300.00 | 0 | 140,790,300.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 1.76 |
| | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Jumlah Pelayanan KB Bergerak | 4 kali | 160,000,000 | 11 Kecamatan | 56,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 5,756,500 | - | 44,101,500.00 | 0 | 44,101,500.00 | 0 | 44,101,500.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.28 |
| | Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB | 90 | 160,000,000 | | 673,248,000 | 0 | | 4297000 | | 106,831,000 | - | 449,785,000 | 0 | 449,785,000 | 0 | 449,785,000 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 2.81 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---------------|--------------|-------------|---|-----------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------|-------|------|------|------|
| | | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra kerja Lainnya yang Berperan Serta dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan kesertaan ber | 7 | 60,000,000 | 3 kali | 106,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | 11 Kec. | 120,000,000 | 11 Kecamatan | 567,248,000 | 0 | 0 | 4,297,000 | 106,831,000 | - | 449,785,000.00 | 0 | 449,785,000.00 | 0 | 449,785,000.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 3.75 | | |
| 8 | Meningkatnya Keluarga Sejahtera | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS) (%) | | 1,088,069,318 | | 705,800,000 | 0 | 6,000,000 | 40,078,000 | - | - | 0 | 523,329,000 | 0 | 119,334,000 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.11 | | | |
| | | | BKB | 0.74 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | |
| | | | BKR | 0.61 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | |
| | | | BKL | 0.62 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | |
| | | | PIK R | 0.51 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | |
| | | | UPPKS | 0.91 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Peran Serta Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Keluarga | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIK R,BKL,UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang Dibina | BKB (73,86%),BKR(61,36%),BKL (61,56%),PIK R(51,19%),UPPKS (90,9%) | 882,269,318 | | 705,800,000 | 0 | 11 Kec. | 6,000,000 | 11 Kec. | 40,078,000 | 11 Kec. | 523,329,000 | 11 Kec. | 523,329,000 | 11 Kec. | 119,334,000 | 1.00 | 0.74 | 1.83 | 0.14 | |
| | | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA S) yang Tersedia | 6 poktan | 204,000,000 | 3 unit | 53,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 Kec. | 53,000,000.00 | 11 Kec. | 53,000,000.00 | 11 Kec. | 53,000,000.00 | 1.00 | 25.98 | 1.83 | 0.26 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|--------|------------|-------------------|-------------|---|---|---------|-----------|---------|------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|--------|------|--------|------|--|
| | | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 6 kali | 65,000,000 | 6 Kelompok | 37,000,000 | o | o | 11 Kec. | 6,000,000 | 11 Kec. | 10,558,000 | 11 Kec. | 36,814,000.00 | 11 Kec. | 36,814,000.00 | 11 Kec. | 36,814,000.00 | 1.00 | 0.99 | 1.83 | 0.57 | |
| | | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 11 Kec | 55,000,000 | 20 Desa/Kelurahan | 615,800,000 | o | o | o | o | 11 Kec. | 29,520,000 | 11 Kec. | 433,515,000.00 | 11 Kec. | 433,515,000.00 | 11 Kec. | 29,520,000 | 100.00 | 0.70 | 100.00 | 0.54 | |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Benteng, Maret 2022
Kepala Dinas,

Drs. ANDI MASSAILE
NIP. 19650806 199402 1 003

Realisasi program dan kegiatan tahun 2021 sebagai berikut :

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 yang didukung dengan dana APBD Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan melalui dua urusan yaitu :

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

b. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

A. Pendapatan

Dalam tahun anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak mengelola Pendapatan.

B. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp. 9.566.900.390,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.035.735.452,- atau 83,99% dengan rincian belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 3.796.620.090,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.661.607.774,- atau 96,44%.
- b. Belanja Barang Jasa dianggarkan sebesar Rp. 4.781.351.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.607.582.378,- atau 75,45%.
- c. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 203.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 203.000.000,- atau 100%.

C. Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp. 785.929.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 563.545.300,- atau 71,70%.

Dari kelompok Belanja Operasi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan alokasi anggaran Rp. 4.646.958.590,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.458.161.990,- atau 95,94% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 19.264.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.581.000,- atau 65,31 % dari alokasi anggaran ;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 19.264.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.581.000,- atau 65,31 %.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 3.762.780.090,- dan terealisasi sebesar Rp 3.635.389.774,- atau 96,61% dari alokasi anggaran;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output tersedianya gaji dan tunjangan ASN, alokasi anggaran Rp. 3.750.580.090,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.619.347.774,- atau 96,50 %.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan output Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, alokasi anggaran Rp. 12.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.692.000,- atau 71,25 %.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 7.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.350.000,- atau 100 %.
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 299.460.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 283.775.879,- atau 94,76% dari alokasi anggaran;
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, alokasi anggaran Rp. 1.998.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.998.000,- atau 100 %.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi anggaran Rp. 60.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.940.000,- atau 100 %.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, alokasi anggaran Rp. 24.375.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.815.700,- atau 89,50 %.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan output Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, alokasi anggaran Rp. 2.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.400.000,- atau 100 %.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi anggaran Rp. 209.747.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 196.622.179,- atau 93,74 %.

- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 416.773.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 400.032.662,- atau 95,98 % dari alokasi anggaran.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi anggaran Rp. 70.277.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.524.322,- atau 77,58 %.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi anggaran Rp. 346.496.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 345.508.340,- atau 99,71 %.
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 148.680.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 126.382.675,- atau 85,00 % dari alokasi anggaran.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan output dengan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, alokasi anggaran Rp. 114.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.978.674,- atau 87,84 %.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi anggaran Rp. 13.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.384.000,- atau 53,51 %.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi anggaran Rp. 19.920.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.020.000,- atau 90,46 %.

2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Pembangunan, dengan alokasi anggaran Rp. 232.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 220.248.200,- atau 94,93% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 31.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.500.000,- atau 79,03 % dari alokasi anggaran ;
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG, outputnya adalah Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 24.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.500.000,- atau 98,59 %.
- b) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi, alokasi anggaran Rp. 26.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.25.050.000,- atau 96,35 % dari alokasi anggaran ;
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, outputnya adalah Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 26.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.050.000,- atau 96,35 %.
- c) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 175.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.170.698.200,- atau 97,54 % dari alokasi anggaran ;

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, outputnya adalah Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 175.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 170.698.200,- atau 97,54%.

3) Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan bertujuan untuk Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan, alokasi Anggaran Rp. 31.000.000,- dan Terealisasi Rp.29.347.000,- atau 94,67 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Program Perlindungan Perempuan adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 31.000.000,- dan terealisasi Rp. 29.347.000,- atau 94,67 % dari alokasi anggaran;

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, outputnya yaitu Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 31.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.347.000,- atau 94,67%.

4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Keluarga, alokasi Anggaran 46.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.580.000,- atau 96,91 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Program Peningkatan Kualitas Keluarga adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi

anggaran Rp. 46.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.580.000,- atau 96,91 % dari alokasi anggaran;

- Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, outputnya yaitu Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 46.000.000,- dan terealisasi sebesar 44.580.000,- atau 96,91 %.

5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Alokasi Anggaran Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah Rp.10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.600.000,- atau 96,00 % dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.600.000,- atau 96,00 % dari alokasi anggaran.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, outputnya adalah Tersedianya Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.600.000,- atau 96,00%.

6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program pemenuhan Hak anak (PHA) dengan tujuan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan dunia usaha di tingkat kabupaten dengan alokasi anggaran Rp.49.466.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.071.001,- atau 92,20% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) adalah sebagai berikut ;

- a) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp.21.740.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.625.000,- atau 99,47% dari alokasi anggaran.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota, outputnya adalah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota, alokasi anggaran Rp.21.740.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.625.000,- atau 99,47%.
- b) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp.27.726.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.446.001,- atau 98,99% dari alokasi anggaran.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, outputnya adalah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%.
 - Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, outputnya adalah Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 17.726.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.446.000,- atau 98,42%.

7. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak dengan alokasi anggaran Rp. 15.510.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.510.000,- atau 100% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Program Perlindungan Khusus Anak adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 15.510.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.510.000,- atau 100% dari alokasi anggaran.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, output Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp15.510.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.510.000,- atau 100% .

8. Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk dengan alokasi anggaran Rp.72.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.545.001,- atau 78,53% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Program Pengendalian Penduduk adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan alokasi anggaran Rp. 31.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.560.000,- atau 79,23% dari alokasi anggaran.
 - Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD.MI dan SLTP/MTS, Jalur Formal dan Informal, outputnya adalah terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD.MI dan SLTP/MTS, Jalur Formal dan

Informal, alokasi anggaran Rp. 31.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.560.000,- atau 79,23% .

- b) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 41.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.985.001,- atau 78,01% dari alokasi anggaran.
- Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, outputnya adalah terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, alokasi anggaran Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.730.000,- atau 51,53% .
 - Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, outputnya adalah terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, alokasi anggaran Rp. 26.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.255.000,- atau 93,29% .

9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga berencana dengan alokasi anggaran Rp. 4.224.730.000,- dari terealisasi Rp. 3.054.432.263,- atau 72,30% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan alokasi anggaran Rp. 986.170.000,- dan teeralisasi Rp 848.345.463,- atau 82,02% dari alokasi anggaran;
- Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, outputnya adalah terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang,

alokasi anggaran Rp. 168.562.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 141.001.800,- atau 83,65% .

- Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK, outputnya adalah terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana), alokasi anggaran Rp. 817.608.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 707.343.663,- atau 86,51%
- b) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan alokasi anggaran Rp. 1.174.849.000,- dan terealisasi sebesar Rp 952.465.000,- atau 81,07% dari alokasi anggaran;
- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB, outputnya adalah Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB, alokasi anggaran Rp. 395.449.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 173.065.000,- atau 43,76% .
 - Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), outputnya adalah terlaksananya Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), alokasi anggaran Rp. 195.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.195.000.000,- atau 100%.
 - Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), outputnya adalah terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), alokasi anggaran Rp. 584.400.000,- dan terealisasi Rp. 584.400.000,- atau 100%.

c) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 790.663.000,- dan teeralisasi Rp 280.507.800,- atau 35,48% dari alokasi anggaran;

- Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya, outputnya adalah Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya, alokasi anggaran Rp. 27.405.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.476.000,- atau 78,37% .
- Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB, outputnya adalah Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB, alokasi anggaran Rp. 8.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 750.000,- atau 9,097% .
- Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), outputnya adalah Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) , alokasi anggaran Rp. 698.008.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 73.390.000,- atau 10,51% .
- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, outputnya adalah Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB , alokasi anggaran Rp. 140.790.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 140.790.300,- atau 100% .

- Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak, outputnya adalah Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak, alokasi anggaran Rp. 56.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.101.500,- atau 78,75% .
- d) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan alokasi anggaran Rp. 567.248.000,- dan terealisasi Rp 449.785.000,- atau 79,29% dari alokasi anggaran;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB, outputnya adalah Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB, alokasi anggaran Rp. . 567.248.000,- dan terealisasi Rp 449.785.000,- atau 79,29%.

10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan Keluarga Sejahtera (KS), dengan alokasi anggaran Rp. 705.800.000,- dan terealisasi Rp. 523.329.000,- atau 74,15% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan dari Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi anggaran Rp. 705.800.000,- dan terealisasi Rp. 523.329.000,- atau 74,15% dari alokasi anggaran.
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), outputnya adalah Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), alokasi anggaran Rp. 53.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.000.000,- atau 100% .

- Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)), outputnya yaitu Terlaksananya Orientasi/Pelatihan teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), alokasi anggaran Rp. 37.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.814.000,- atau 95,50% .
- Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga), outputnya yaitu Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga, alokasi anggaran Rp. 615.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 433.515.000,- atau 70,40% .

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun kebijakan Nasional. Program prioritas pembangunan DP3AP2KB Tahun 2023 guna menunjang Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
6. Program Pemenuhan Hak Anak
7. Program Perlindungan Khusus Anak
8. Program Pengendalian Penduduk
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana
10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan visi misi yang ditetapkan.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja DP3AP2KB Tahun 2023 adalah implementasi Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan

3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AP2KB mendukung pencapaian misi ke-1, misi ke-2 dan misi ke-3.

Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. Tujuan 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah, sasaran 1 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Misi ke-2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, tujuan 2 : Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan, sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Perdesaan, yaitu Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Misi ke-3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, tujuan 3 : Meningkatnya Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sasaran 4 : Meningkatnya Pemenuhan Dasar Masyarakat, yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Sasaran Renja DP3AP2KB adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel;
2. Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
3. Berkurangnya penduduk miskin;
4. Meningkatnya daya beli masyarakat;
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
6. Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program dapat juga diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Jumlah program yang diusulkan Tahun Anggaran 2023 adalah 10 program dengan 29 kegiatan dan 121 sub kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DP3AP2KB

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan, maka rencana kerja kedepan berdasarkan urusan dan indikator kinerja kunci (IKK) yang tercantum pada RPJMD 2021-2026.

Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, pemberantasan kemiskinan dan pendayagunaan potensi daerah.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan adalah :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan

BAB V

PENUTUP

Renja sebagai pedoman bagi pemerintah di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. DP3AP2KB berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja DP3AP2KB serta diselaraskan dengan RKPD Tahun 2023;
 - b. DP3AP2KB berkewajiban menyusun RKA Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja ;
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan.
3. Rencana Tindak Lanjut

Renja selain sebagai pedoman pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja DP3AP2KB. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

RENCANA KERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju | | | |
|------|---|--------------------|--------------------------|----------------|---|----------------------------|--|---|--|--|---------------|---|--|--------------------------------------|--|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | Tolak Ukur | | | Target | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | 6,298,213,976 | | 5,758,819,576 | | |
| 2 | 08 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | 2,626,023,840 | | 2,957,023,840 | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | 52,023,840 | | 55,023,840 | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan alokasi anggaran | Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 6 Dokumen | tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan alokasi anggaran | 12,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 15,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Persentase Capaian Kinerja | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Dokumen | Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 6,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Persentase Capaian Kinerja | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Dokumen | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 6,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Persentase Capaian Kinerja | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Dokumen | Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 7,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 7,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Persentase Capaian Kinerja | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3 Dokumen | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 7,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 7,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------|---|----------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------|---------------|
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Capaian Kinerja | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Laporan | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 14,023,840 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 14,023,840 |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 1,131,200,000 | | | | 1,560,200,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Capaian Kinerja Keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 43 Orang/bu | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 1,071,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | 1,500,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase Capaian Kinerja Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Dokumen | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 25,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | 25,200,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase Capaian Kinerja Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 15,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Persentase Capaian Kinerja Keuangan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Dokumen | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Persentase Capaian Kinerja Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Laporan | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se meste SKPD | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Persentase Capaian Kinerja Keuangan | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kab. Kepulauan Selayar, | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---|---|---|--|--|------------|---|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------|------------|
| 2 | 08 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | 175,000,000 | | | | | 205,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Kab. Kepulauan Selayar | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Unit | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | | 0 |
| 2 | 08 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 43 Paket | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 80,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | | 80,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 21 Dokumen | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 25,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | | 25,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Kepulauan Selayar, | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | | 0 |
| 2 | 08 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 6 Orang | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | | 50,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 43 Orang | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 20,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | | 50,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 466,000,000 | | | | | 370,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10 Paket | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 20,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10 Paket | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50,000,000 | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---|---|---|--|--|-------------|---|-------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5 Paket | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 12,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 0 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 50 Paket | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | | 0 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Paket | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 20,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | | 20,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Dokumen | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 15,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Tersedianya Bahan/Material | Kab. Kepulauan Selayar | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 Paket | Tersedianya Bahan/Material | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | | 0 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Laporan | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | | 15,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 350 Laporan | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 300,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | | 300,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 75,000,000 | | | | | | 40,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Kepulauan Selayar | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 Unit | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---|--|--|--|--|------------|--|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--------------------|
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Tersedianya Mebel | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5 Unit | Tersedianya Mebel | 40,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 0 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5 Unit | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | 35,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | | 40,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Benteng dan Kec. Pasilambena | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 Unit | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | | 0 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 546,800,000 | | | | | | | 546,800,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Teraksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Laporan | Teraksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 90,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | | 90,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Laporan | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | | 50,000,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Laporan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 406,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | | 406,800,000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 180,000,000 | | | | | | | 180,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 84 Unit | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | 100,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 100,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---|--|--|--|---|-----------|--|-------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------|
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Kepulauan Selayar | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 50 Unit | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 40,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | 40,000,000 |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Kab. Kepulauan Selayar | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | 0 |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Unit | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 40,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 40,000,000 |
| 2 | 08 | 02 | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | | | 418,795,736 | | | | | | 368,795,736 |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | 248,795,736 | | | | | | 198,795,736 |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 2 Dokumen | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan | 100,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100,000,000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 5 Dokumen | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | 40,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 40,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---|--|--|--|---|---------------------|--|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jterlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 29 Perangkat Daerah | Jterlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 0 |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 04 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 38 Perangkat Daerah | Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan | 58,795,736 | | | | | | 58,795,736 |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | 85,000,000 | | | | | | 85,000,000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 2 Dokumen | Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 40,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 40,000,000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 35 Organisasi | Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan | 45,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 45,000,000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | 85,000,000 | | | | | | 85,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|--|--|---|--|---|-----------|---|-------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--------------------|
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 5 Orang | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 40,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 40,000,000 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 2 Dokumen | Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 45,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 45,000,000 | |
| 2 | 08 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | | | 1,178,400,024 | | | | | | 1,078,000,000 | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 200,000,000 | | | | | | | 100,000,000 |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Perlindungan Perempuan | 2 Dokumen | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 100,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------|
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Perlindungan Perempuan | 29 Perangkat Daerah | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 100,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100,000,000 |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | 278,400,024 | | | | | 278,000,000 |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Perlindungan Perempuan | 15 Orang | Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 150,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 150,000,000 |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Perlindungan Perempuan | 4 Layanan | Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 128,400,024 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 128,000,000 |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 700,000,000 | | | | | 700,000,000 |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Perlindungan Perempuan | 3 Dokumen | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 100,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------|--|-------------|--------------------------------------|--|--|--------------------|-------------|
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Perlindungan Perempuan | 5 Orang | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 200,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 200,000,000 |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik | Tersedianya Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Perlindungan Perempuan | 5 Orang | Tersedianya Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 150,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 150,000,000 |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Perlindungan Perempuan | 8 Dokumen | Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 250,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 250,000,000 |
| 2 | 08 | 04 | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | | | 157,030,376 | | | | | 125,000,000 | |
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 65,889,200 | | | | | 65,000,000 | |
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Perlindungan Perempuan | 29 Perangkat Daerah | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 30,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 30,000,000 |
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Perlindungan Perempuan | 2 Dokumen | Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 15,889,200 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 15,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---|--|--|--------------------------------|-----------|--|------------|--------------------------------------|--|--|--|------------|------------|
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | 03 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Perlindungan Perempuan | 1 Dokumen | Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 20,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 20,000,000 | |
| 2 | 08 | 04 | 2.02 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 75,000,000 | | | | | | | 40,000,000 |
| 2 | 08 | 04 | 2.02 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Perlindungan Perempuan | 1 Lembaga | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah | 20,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 20,000,000 | |
| 2 | 08 | 04 | 2.02 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Perlindungan Perempuan | 5 Orang | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 20,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 20,000,000 | |
| 2 | 08 | 04 | 2.02 | 03 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Perlindungan Perempuan | 1 Dokumen | Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat | 35,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 | |
| 2 | 08 | 04 | 2.03 | | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 16,141,176 | | | | | | | 20,000,000 |
| 2 | 08 | 04 | 2.03 | 01 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang Terstandarisasi | Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | Tersedianya Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Perlindungan Perempuan | 1 Layanan | Tersedianya Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 16,141,176 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|--|---|--|---|--------------|---|-------------|--------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| 2 | 08 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | | | | 152,964,000 | | | | | 160,000,000 | |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 152,964,000 | | | | | | 160,000,000 |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | 01 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kabupaten/Kota | Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | Tersedianya Data Gender dan Anak di Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak | 30 Dokumen | Tersedianya Data Gender dan Anak di Kabupaten/Kota | 52,964,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | 60,000,000 | |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | 02 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kabupaten/Kota | Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak | 12 Dokumen | Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kabupaten/Kota | 100,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 100,000,000 | |
| 2 | 08 | 06 | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | | | 1,230,000,000 | | | | | 830,000,000 | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | 250,000,000 | | | | | | 250,000,000 |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (%) (skor indikator KLA) | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 5 Organisasi | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 150,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 150,000,000 | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (%) (skor indikator KLA) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 5 Dokumen | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 100,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 100,000,000 | |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | 980,000,000 | | | | | 580,000,000 | |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | 01 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (%) (skor indikator KLA) | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 100 Orang | Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 200,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 100,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------|
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (%) (skor indikator KLA) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 5 Dokumen | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 130,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 130,000,000 |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (%) (skor indikator KLA) | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 2 Dokumen | Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 500,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 200,000,000 |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | 04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (%) (skor indikator KLA) | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 6 Dokumen | Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 150,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 150,000,000 |
| 2 | 08 | 07 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | | | | 535,000,000 | | | | | 240,000,000 |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 100,000,000 | | | | | 100,000,000 |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Prerindungan Khusus Anak | 29 Perangkat Daerah | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 50,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---|--|--|--|----------------------------------|------------|--|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------|
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Prerindungan Khusus Anak | 1 Dokumen | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 50,000,000 |
| 2 | 08 | 07 | 2.02 | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 350,000,000 | | | | | 100,000,000 |
| 2 | 08 | 07 | 2.02 | 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Prerindungan Khusus Anak | 100 Orang | Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 |
| 2 | 08 | 07 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Prerindungan Khusus Anak | 50 Layanan | Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 100,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100,000,000 |
| 2 | 08 | 07 | 2.02 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Prerindungan Khusus Anak | 2 Dokumen | Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 |
| 2 | 08 | 07 | 2.02 | 04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Prerindungan Khusus Anak | 1 Dokumen | Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 100,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|--|---|--|----------------------------------|----------------------|---|-------------|--------------------------------------|--|----------------------|--|-------------|
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 85,000,000 | | | | | 40,000,000 | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Prerindungan Khusus Anak | 2 Dokumen | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 65,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kab/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Prerindungan Khusus Anak | 1 Dokumen | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 20,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 40,000,000 |
| 2 | 14 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | 3,687,038,000 | | | | | 4,487,469,000 | | |
| 2 | 14 | 02 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | | 870,000,000 | | | | | 600,000,000 | | |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | | | 605,000,000 | | | | | 310,000,000 | | |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 01 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) | TFR (Angka Kelahiran Total) | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengendalian Penduduk | 1 Dokumen | Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) | 100,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 150,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 02 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | TFR (Angka Kelahiran Total) | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengendalian Penduduk | 2 Dokumen | Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | 350,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|-----------------------------|---|---|--|-------------------------------|---------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------|
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 03 | Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | TFR (Angka Kelahiran Total) | Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengendalian Penduduk | 11 Dokumen | Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | 45,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 50,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan | TFR (Angka Kelahiran Total) | Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan | Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengendalian Penduduk | 11 Dokumen | Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan | 25,000,000 | | | | | 25,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 09 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | TFR (Angka Kelahiran Total) | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengendalian Penduduk | 2 Satuan Pendidikan | Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 35,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 35,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 10 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | TFR (Angka Kelahiran Total) | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan | Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengendalian Penduduk | 2 Laporan | Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana | | | | 50,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 265,000,000 | | | | | 290,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 03 | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | TFR (Angka Kelahiran Total) | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Tersusunnya Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengendalian Penduduk | 1 Dokumen | Tersusunnya Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 35,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | | | 35,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 08 | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain | TFR (Angka Kelahiran Total) | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk | Dibentuknya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengendalian Penduduk | 2 Unit | Dibentuknya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain | 25,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 25,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---|---|--|--|---|---------------|--|------------|--|--|--|----------------------|------------|
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 11 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | TFR (Angka Kelahiran Total) | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya | Tersedianya Data dan Informasi Keluarga | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengendalian Penduduk | 11 Dokumen | Tersedianya Data dan Informasi Keluarga | 55,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana | | | | 60,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 12 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengendalian Penduduk | 11 Laporan | Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 60,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana | | | | 75,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | TFR (Angka Kelahiran Total) | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengendalian Penduduk | 11 Dokumen | Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 45,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 50,000,000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPBPK | TFR (Angka Kelahiran Total) | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pengendalian Penduduk | 11 Laporan | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) | 45,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 45,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | | | 1,836,434,000 | | | | | 2,684,709,000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | 337,375,000 | | | | | 1,141,600,000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 01 | Advokasi Program KKBPBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 12 Organisasi | Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 4,375,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | 40,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--|--|--|---|------------|--|-------------|--|--|--|--|-------------|
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 02 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 2 Dokumen | Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 25,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | 40,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 04 | Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 4 Dokumen | Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 46,400,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | 50,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 11 Laporan | Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 171,600,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | 171,600,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---|--|--|--|---|------------|---|------------|--|--|--|--------------------|-------------|
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 11 Laporan | Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 800,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 08 | Pengendalian Program KKBPK | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1 Laporan | Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK | 40,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | 40,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | | | | | 431,400,000 | | | | | 450,000,000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 02 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia | Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | | Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | 0 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | | 0 |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 03 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga | | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | | Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---|--|---|--|---|------------|---|-------------|--|--|--|--------------------|-------------|
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 474 Orang | Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 431,400,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer | | | | 450,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 441,909,000 | | | | | 467,359,000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 17 Laporan | Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 6,750,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | 25,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 4224 Orang | Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 247,359,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | 247,359,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 07 | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 50 Orang | Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | 20,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | 25,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 17 Laporan | Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 7,800,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | 10,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---|--|--|--|---|------------|--|-------------|--|--|--|--------------------|-------------|
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 11 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 11 Laporan | Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 80,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 80,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 12 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 100 Orang | Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | 80,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 80,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | | | | 625,750,000 | | | | | 625,750,000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 02 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | TerIntegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 1 Dokumen | TerIntegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 80,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 80,000,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 27 Kampung | Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | 465,750,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | 465,750,000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 04 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB | Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 27 Laporan | Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB | 80,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 80,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|--|---|--|--|------------|---|------------|--|--|--|----------------------|--------------------|
| 2 | 14 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | | | 980,604,000 | | | | | 1,202,760,000 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | 800,604,000 | | | | | | 967,760,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 01 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS) | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk | Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 5 Kelompok | Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100,000,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 02 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 2 Unit | Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 20,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | | 100,000,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 03 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 1 Laporan | Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 20,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 50,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|---|--|--|--|------------|--|-------------|--|--|--|--|-------------|
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 04 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS) | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 35 Orang | Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 30,000,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 05 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 4247 Orang | Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 687,760,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | 687,760,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 06 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS) | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Tersedianya elompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kab.Kep | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | | Tersedianya elompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 0 | DAK Non Fisik- BOKB-KB | | | | 0 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 08 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Kab. Kepulauan Selayar | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | | Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 0 | DAK Non Fisik- BOKB-KB | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|---|---|---|--|---|--|--|---------------|---|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------|
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 10 | Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK | Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi (iBangga Indeks Pembangunan Keluarga) | Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi (iBangga Indeks Pembangunan Keluarga) | Kab. Kepulauan Selayar | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | | Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi (iBangga Indeks Pembangunan Keluarga) | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 12 | Sosialisasi IPK | Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS) | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | Terlaksananya Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 15 Orang | Terlaksananya Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | 12,844,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | 180,000,000 | | | | | 235,000,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 01 | Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKS) | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terlaksananya Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 25 Organisasi | Terlaksananya Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi | 60,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 60,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------|----|---|--|---|---|--|--|------------|--|----------------------|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 02 | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan | Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 11 Laporan | Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 60,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100,000,000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 04 | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | Terlaksananya romosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 1 Laporan | Terlaksananya romosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | 60,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 75,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 9,985,251,976 | | | | | 10,246,288,576 |

Benteng, Maret 2022
Kepala Dinas,

Drs. ANDI MASSALE
NIP. 19650806 199402 1 003